



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

ASK BAN-PT NO: .3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

***Analisis Open Governance* pada Sistem Layanan Digital**
SADAYANA Kota Bandung

Skripsi

Oleh:

Bernadeth Getrudis Roflebabin

6071901121

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

ASK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

Analisis Open Governance Pada Sistem Layanan Digital
SADAYANA Kota Bandung

Skripsi

Oleh:

Bernadeth Getrudis Roflebabin

6071901121

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Bernadeth Getrudis Roflebabin
Nomor Pokok : 6071901121
Judul : Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital
SADAYANA Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 12 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

: 

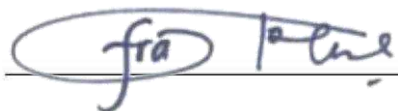
Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

: 

Anggota

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Bernadeth Getruds Rofebabin
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901121
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Triano Sakti Herwanto, S.IP., MPA. (20150182) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Rabu tanggal 12 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung
Judul (Bahasa Inggris) : Analysis of Open Governance in the Digital Service System SADAYANA in Bandung City

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case)

Judul (Bahasa Indonesia) TIDAK ADA PERUBAHAN

Judul (Bahasa Inggris) MENYESUAIKAN

2. Perbaikan Unsur (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) : Menyesuaikan

3. Perbaikan di Bab 1 Support dengan data kuantitatif dari sumber yang resmi untuk bagian indikasi masalah

4. Perbaikan di Bab 2 Novelty riset ini perlu diuraikan dengan lebih mendetail terutama perbedaan penelitian anda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gunakan analisis bibliometrik

5. Perbaikan di Bab 3 1. Penentuan populasi dan sampel, perlu dipertimbangkan lagi. Bagian penentuan sampel di halaman 35 diulaskan ke bagian atas. Jelaskan kenapa bukan 8000, bukan 426, gunakan digital divide
2. Penguatan argumentasi pilihan citizen journalism (penempatannya disesuaikan). Halaman 35, Populasi dan sampel sudah dijelaskan namun penjelasan kenapa pengguna Citizen Journalism yang digunakan belum disampaikan
3. Tuliskan dengan detail sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

6. Perbaikan di Bab 4 Dapat dilaborasi lebih lanjut terkait penjelasan dibalik temuan Citizen Centricity yang rendah

7. Perbaikan di Bab 5 Rekomendasi cari yang lebih kreatif

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 12 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_lap.fisip@unpar.ac.id
7/12/2023 16:23:41

Triano Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

kristian.widya@unpar.ac.id
7/12/2023 16:52:30

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D.

Penguji (Pembimbing),

trianosakti@unpar.ac.id
7/12/2023 16:10:44

Triano Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

tutikr@unpar.ac.id
7/12/2023 16:54:12

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bernadeth Getrudis Roflebabin
NPM : 6071901121
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik Program Sarjana
Judul : Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung

Menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul “Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung” merupakan hasil karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri oleh peneliti dan bukanlah hasil karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari karya ilmiah ini terbukti melakukan tindakan plagiarisme, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bandung, 22 Juni 2023



Bernadeth Getrudis Roflebabin

Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	11% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	www.frontiersin.org Internet Source	1%
4	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
5	prosidingseminakel.hangtuah.ac.id Internet Source	1%
6	sultanist.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
8	ppid.temanggungkab.go.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Hellenic Academic Libraries Link Student Paper	<1%

ABSTRAK

Nama : Bernadeth Getrudis Roflebabin
NPM : 6071901121
Judul : Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital
SADAYANA Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Open Governance* pada sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam paradigma *Open Governance* yang hadir sebagai pandangan baru tentang tata kelola baru perkotaan dengan inovasi kolaborasi baru melalui teknologi *platform*. Paradigma ini dapat diterapkan di Indonesia karena mendukung SPBE dan *smart city*. Sebagai salah satu pelopor *smart city*, Pemerintah Kota Bandung mencoba mewujudkan *smart city* dengan menginisiasi layanan digital yang disebut SADAYANA untuk memberikan kemudahan layanan *online* bagi masyarakat melalui sebuah aplikasi. Namun dalam pelaksanaan SADAYANA, terdapat beberapa indikasi masalah *Open Governance* yang ditemukan yaitu Pertama, kegagalan *connected intelligence* karena tidak seluruh fitur dalam SADAYANA dapat diakses, hal ini tidak berjalannya akses layanan digital yang cepat. Kedua, kegagalan *digital altruism* karena informasi yang disediakan SADAYANA masih terbatas, hal ini belum terciptanya keterlibatan masyarakat dalam menyajikan informasi. Terakhir, kegagalan *radical openness* karena kurangnya sosialisasi SADAYANA, hal ini berarti SADAYANA belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Open Governance* yang memiliki 5 prinsip, antara lain: *radical openness*, *citizen centrality*, *digital altruism*, *connected intelligence*, dan *crowdsourced deliberation*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif non eksperimental dengan strategi penelitian survei, dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 responden yang merupakan pengguna aktif fitur *Citizen Journalism* SADAYANA. Penelitian ini menggunakan analisis data *central tendency* dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke 5 prinsip *Open Governance* sudah diterapkan dengan baik dalam sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung. Namun berdasarkan hasil temuan ditemukan bahwa SADAYANA belum sepenuhnya memfasilitasi interaksi antar masyarakat, maka saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu melakukan pengembangan fitur *chat* baik *personal chat* maupun *group chat* dan fitur *video* yang dapat digunakan oleh antar masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi baik melalui chat maupun audio visual.

Kata Kunci: *Open Governance*, SADAYANA, Kota Bandung

ABSTRACT

Name : Bernadeth Getrudis Roflebabin
NPM : 6071901121
Title : *Analysis of Open Governance in the Digital Service System SADAYANA in Bandung City*

This research aims to find out how the principles of Open Governance are applied to the SADAYANA digital service system in Bandung City. These principles are contained in the Open Governance paradigm, which exists as new preception of urban governance with new collaborative innovation through platform technology. This paradigm can be applied ini Indonesia because it supports SPBE and smart city. As one of the pioneers of smart city the government of the Bandung city seeks to realize a smart city by initiating a digital service called SADAYANA to provide online service for society through an application. However, in the implementation of SADAYANA, there are some indications of Open Governance problems that have been found. First, the failure of connected intelligence is because not all features in SADAYANA are accessible; it is not the course of instant access for digital services. Second, the failure of digital altruism is because the information provided by SADAYANA is still limited; it does not create the involvement of the public in presenting information. Last, the failure of radical openness due to lack of socialization of the present means that the present has not been able to reach the entire society.

The theory used in this research is Open Governance, which has five principles, among others: radical openness, citizen centricity, digital altruism, connected intelligence, dan crowdsourced deliberation. The method used in this research are non-experimental quantitative approaches with survey research strategies and data collection techniques using questionnaires. The sample used in this research was composed of 81 respondents who were active users of the citizen journalism feature of SADAYANA. The research uses central tendecy data analysis using the SPSS program.

The results of this research show that the five principles of open governance have already been well implemented in the digital services system of SADAYANA in Bandung City. However, based on the findings that SADAYANA has not fully facilitated interaction between societies, the advice given from this research is to develop chat features, both personal chat and group chat, and video features that can be used by the society to interact and share information both through chat and audiovidual.

Keywords: *Open Governance, SADAYANA, Bandung City*

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang mampu menggantikan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “**Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung**” dengan lancar di waktu yang tepat. Dalam menyelesaikan tanggung jawab serta kewajiban sebagai seorang mahasiswa, peneliti mengetahui bahwasannya tidak mudah untuk mampu bertahan dengan versi terbaik dan melewati berbagai macam hambatan dan kendala yang terjadi semasa kuliah. Terutama pada saat proses penyusunan sampai dengan penyelesaian penelitian ini. Dengan demikian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, saran, bantuan, dan usahanya kepada saya selaku peneliti.

Pertama-tama peneliti berterima kasih kepada kedua Orang Tua tercinta yang sangat saya banggakan yakni Bapak Vincensius Romanus Roflebabin serta Ibu tercinta Margaretha Yuliane yang tiada hentinya memberikan usaha, tenaga serta doanya yang terbaik kepada peneliti selama ini. Di samping itu, peneliti berterima kasih juga kepada Kakak terbaik yakni Maria Norbertha Novi Roflebabin dan Adik-Adik peneliti yaitu Laurensius Landelinus Angel Roflebabin, Rafael Domianus Alob Roflebabin, dan Gabriel Sar'an Akoramin Roflebabin yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi bagi saya untuk tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Setelah itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Mas Trisno Sakti Herwanto yang telah berkenan menjadi Dosen

Pembimbing saya mulai dari awal Rancangan Penelitian sampai dengan akhirnya masuk pada tahap skripsi. Terima Kasih atas bimbingannya, waktu, dan pengalamannya untuk hadir serta berproses bersama-sama dengan saya selama penyusunan penelitian ini. Selanjutnya adapun dalam hal ini, peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Drs., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Indraswari M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Keluarga Besar Roflebabin dan Sumedang yang telah memberikan doa serta dukungan dengan sepenuhnya untuk peneliti.
5. Sahabat terbaik peneliti, Feren Steviolla (Olla) yang telah memberikan dukungan, waktu, tenaga, usaha, dan doa untuk peneliti. Terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah peneliti dalam proses menyelesaikan penelitian.
6. Teman-teman seuseurian wae kuy Carissa Kamiliya, Siti Giskashafa Khaerunnisa, Athaya Saffana E, dan Deandra Silka A. peneliti berterima kasih telah menjadi teman sedari bakti desa (semester awal perkuliahan) sampai dengan saat ini. Terima kasih selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

7. Teman-teman Asosiasi Mas Sakti yakni Ghiska, M. Raihan, dan Hasbi Rohmansyah terima kasih atas pengalaman bimbingan bersama peneliti hampir setiap minggu di ruangan Mas Sakti bahkan hingga bimbingan di rumah Mas Sakti.
8. Teman-teman seperjuangan publik M. Azriel Hasbi, Megantari Putri Fauziah, Maria Stefani Rachella, Richarda Canda Novenaten, Stefani Cyntia, Theresia Erinata Hutasoit, Tasya Elsia Miranda Pakpahan, Karen Christina Jessica, dan Satria Negarawan.
9. Teman sedari SMP Vela Belleza, Nadia Shafa Safitri, Dinda Daina, dan Shafa Aurelia, peneliti berterima kasih atas dukungannya.
10. Bapak Ganjar Setya Pribadi selaku Kepala Seksi Evaluasi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Diskominfo Kota Bandung, terima kasih atas telah bersedia menyediakan waktu wawancara secara daring (*online*).
11. Seluruh Responden yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia mengisi kuesioner penelitian secara daring (*online*) melalui *google form*.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik (HMPSIAP) UNPAR 2021, terima kasih atas dukungan dan doanya bagi peneliti. Khususnya kepada Darrel Daniswara, Christopher Leopold, Aura, Sherina, Megantari, dan Theresia.
13. Keluarga besar Unpar Ambassador Batch 2021 dan 2022, khususnya Ka Matheus, Ka Monika, Ko Desvianto, dan Ka Ema yang mendukung keberlangsungan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

14. Keluarga besar Gratia Youth Catholic Community (GYCC) Santo Petrus Katedral Bandung, I'm so blessed to have you guys!
15. Keluarga besar Pastoral Katedral St. Petrus Bandung khususnya Pastor paroki, Pelikan Katedral, Pak Budi, Bu Ira, Bu Navita yang telah memberikan dukungan kepada peneliti.
16. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu peneliti selama proses pengerjaan hingga penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.
17. Dan terakhir saya mau berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu memberikan segala kemampuan, pikiran, usaha, dan materi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata “sempurna” serta tetap diperlukannya saran serta kritik untuk keberlanjutan serta kemajuan dari penelitian ini. Selain itu, penelitian ini tidak luput dari sebuah kekurangan, maka dari itu dengan segala kekurangannya semoga penelitian ini tetap dapat memberikan manfaat secara utuh sesuai dengan kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.

Roma 5 ayat 4 “Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan.”

Bandung, 22 Juni 2023

Bernadeth Getrudis Roflebabin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	16
1.3 TUJUAN PENELITIAN	16
1.4 MANFAAT PENELITIAN	16
1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN	17
BAB II	20
LANDASAN TEORI.....	20
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	20
2.2 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).....	27
2.3 PARADIGMA OPEN GOVERNANCE.....	29
2.4 PENERAPAN OPEN GOVERNANCE PADA SPBE	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 RANCANGAN PENELITIAN	39
3.2 LOKASI PENELITIAN	40

3.3	POPULASI DAN SAMPEL	41
3.3.1	Populasi.....	41
3.3.2	Sampel.....	42
3.4	PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN	44
3.4.1	Instrumen Penelitian.....	44
3.4.2	Skala Pengukuran.....	49
3.4.3	Validasi dan Reliabilitas Instrumen	50
3.5	PENGUMPULAN DATA.....	57
3.6	TEKNIK ANALISIS DATA.....	59
BAB IV	62
PROFIL PENELITIAN	62
4.1	SISTEM LAYANAN DIGITAL SADAYANA	62
BAB V	67
HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1	HASIL KUESIONER PENELITIAN ANALISIS <i>OPEN GOVERNANCE</i> PADA SISTEM LAYANAN DIGITAL SADAYANA KOTA BANDUNG ..	67
5.2	PEMBAHASAN ANALISIS DATA <i>CENTRAL TENDENCY</i> TERHADAP HASIL KUESIONER PENELITIAN ANALISIS <i>OPEN</i> <i>GOVERNANCE</i> PADA SISTEM LAYANAN DIGITAL SADAYANA KOTA BANDUNG	83
BAB VI	114
PENUTUP	114
6.1	KESIMPULAN	114

6.2	SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA		117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Open Governance sebagai Paradigma baru.....	6
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2. 2	Elemen Inti Paradigma Open Governance	31
Tabel 3. 1	Indikator Penelitian	47
Tabel 3. 2	Daftar Pernyataan Instrumen Penelitian menyesuaikan dengan Penerapan Konsep Open Governance dalam SADAYANA.....	48
Tabel 3. 3	Item Respon atas Analisis Open Governance pada SADAYANA	50
Tabel 3. 4	Derajat Validitas Instrumen.....	50
Tabel 3. 5	Hasil Pengujian Validitas Pearson.....	50
Tabel 3. 6	Pedoman Menentukan Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari Cronbach	56
Tabel 3. 7	Hasil Pengujian Reliabilitas	57
Tabel 3. 8	Kelas Interval Rata-Rata Skor Responden	50
Tabel 5. 1	Rata-Rata Skor Tanggapan Responden	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pengguna Internet dan Jumlah Media Sosial Global (Periode 2018-2022).....	8
Gambar 1. 2 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (1998-2022)	9
Gambar 2. 1 Hasil Visualisasi <i>Network Co-Accurrence</i> (Kata Kunci) “ <i>Open Governance</i> ”	24
Gambar 2. 2 Hasil Visualisasi <i>Overlay Co-Accurrence</i> (Kata Kunci) “ <i>Open Governance</i> ”	25
Gambar 2. 3 Hasil Visualisasi <i>Density Co-Accurrence</i> (Kata Kunci) “ <i>Open Governance</i> ”	26
Gambar 3. 1 Grafik Distribusi Normal	61
Gambar 4. 1 Tampilan Dan Fitur Aplikasi SADAYANA.....	64
Gambar 4. 2 Cara & Langkah Menggunakan Aplikasi SADAYANA	65
Gambar 5. 1 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Pertama (Data Terbuka Polisentris)	68
Gambar 5. 2 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kedua (Komunikasi Masyarakat-Pemerintah Interaktif Dalam Skala Luas)	69
Gambar 5. 3 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Ketiga (Budaya Keterbukaan)	70

Gambar 5. 4 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Keempat (Pemerintah Memfasilitasi Interaksi C2C)	71
Gambar 5. 5 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kelima (Bentuk Demokrasi Tidak Resmi)	72
Gambar 5. 6 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Keenam (Co-Production Nilai Bersama atau Publik).....	73
Gambar 5. 7 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Ketujuh (Tata Kelola Berbasis Data Bersama).....	74
Gambar 5. 8 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kedelapan (Prinsip Timbal Balik)	75
Gambar 5. 9 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kesembilan (Pengorganisasian Sistem Tanpa Kepemimpinan).....	76
Gambar 5. 10 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kesepuluh (Sistem Kecerdasan Ter Dekonsentrasi)	77

Gambar 5. 11 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kesebelas (Interaksi Berskala Besar, Terhubung, dan Terdistribusi).....	78
Gambar 5. 12 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Keduabelas (Partisipasi yang Beragam, Setara, dan Deliberatif)	79
Gambar 5. 13 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Ketigabelas (Pemerintah Berpihak Pada Rakyat)	80
Gambar 5. 14 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Keempat Belas (Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi).....	81
Gambar 5. 15 Grafik Analisis Open Governance pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung, Berdasarkan Pada Pernyataan Kelima Belas (Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi).....	82
Gambar 5. 16 Tabel Statistik Data Terbuka Polisentris	84
Gambar 5. 17 Histogram Data Terbuka Polisentris.....	84
Gambar 5. 18 Tabel Statistik Komunikasi Masyarakat-Pemerintah Secara Interaktif dalam Skala Luas	85
Gambar 5. 19 Histogram Komunikasi Masyarakat-Pemerintah Secara Interaktif dalam Skala Luas	86
Gambar 5. 20 Tabel Statistik Budaya Keterbukaan	87
Gambar 5. 21 Histogram Budaya Keterbukaan.....	88

Gambar 5. 22	Tabel Statistik Pemerintah Memfailitasi Interaksi C2C	89
Gambar 5. 23	Histogram Pemerintah Memfasilitasi Interaksi C2C	90
Gambar 5. 24	Tabel Statistik Bentuk Demokrasi Tidak Resmi	91
Gambar 5. 25	Histogram Bentuk Demokrasi Tidak Resmi.....	91
Gambar 5. 26	Tabel Statistik Co-Production Nilai Bersama atau Publik	93
Gambar 5. 27	Histogram Co-Production Nilai Bersama atau Publik.....	93
Gambar 5. 28	Tabel Statistik Tata Kelola Berbasis Data Bersama.....	94
Gambar 5. 29	Histogram Tata Kelola Berbasis Data Bersama	95
Gambar 5. 30	Tabel Statistik Prinsip Timbal Balik	96
Gambar 5. 31	Histogram Prinsip Timbal Balik.....	97
Gambar 5. 32	Tabel Statistik Pengorganisasian Sistem Tanpa Kepemimpinan	98
Gambar 5. 33	Histogram Pengorganisasian Sistem Tanpa Kepemimpinan.....	99
Gambar 5. 34	Tabel Statistik Sistem Kecerdasan Ter Dekonsentrasi	100
Gambar 5. 35	Histogram Sistem Kecerdasan Ter Dekonsentrasi	100
Gambar 5. 36	Tabel Statistik Interaksi Berskala Besar, Terhubung, dan Terdistribusi	101
Gambar 5. 37	Histogram Interaksi Berskala Besar, Terhubung, dan Terdistribusi	102
Gambar 5. 38	Tabel Statistik Partisipasi yang Beragam, Setara, dan Deliberatif	103
Gambar 5. 39	Histogram Partisipasi yang Beragam, Setara, dan Deliberatif ..	104
Gambar 5. 40	Tabel Statistik Pemerintah Berpihak Pada Rakyat	105
Gambar 5. 41	Histogram Pemerintah Berpihak Pada Rakyat	106

Gambar 5. 42 Tabel Statistik Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi.....	107
Gambar 5. 43 Histogram Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi	108
Gambar 5. 44 Tabel Statistik Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi.....	109
Gambar 5. 45 Histogram Terbuka, Asinkron, Depersonalisasi, dan Musyawarah Terdistribusi.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Administrasi publik menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dijelaskan oleh *Southern New Hampshire University* bahwa administrasi publik adalah bidang yang sangat luas yang mencakup pelayanan publik untuk kepentingan bersama dan dapat memberikan perubahan yang lebih baik.¹

Administrasi publik (*Public Administration*) merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen utama kehidupan bernegara yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta berbagai hal yang berhubungan dengan publik seperti kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika dalam mengatur penyelenggaraan negara.² Sebagai suatu ilmu, Administrasi publik terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan zaman. Perkembangan administrasi publik dapat dilihat dari perubahan paradigma melalui beberapa fase yakni diawali pada Paradigma *Old Public Administration* (OPA), paradigma ini dilandaskan adanya sebuah gerakan perubahan terkait dikotomi antara politik dan administrasi. fokus administrasi publik pada saat itu mengenai masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran birokrasi dan pemerintah.³

¹ Krysten, Godfrey. 'What is Public Administration' <https://www.snhu.edu/about-us/newsroom/business/what-is-public-administration> (18.03.21)

² Doli T.R. Panjaitan dan Piki D.K. Pardede, *Administrasi Publik*. (Kabupaten Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), 1

³ E.I. Supriyadi, *Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik*. Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.3, No. 1, (2021), 11

Pada perjalanannya, paradigma OPA dianggap memiliki keterbatasan karena menganut sistem pemerintahan yang kaku dan sentralistik, tidak menerapkan prinsip keterbukaan dan *responsiveness*, kurang efektif dalam memberikan pelayanan publik, terlalu menyederhanakan realitas struktur sosial kemasyarakatan, birokrasi yang diterapkan hanya dipersiapkan dalam tugas-tugas rutin saja sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan atau perubahan yang terjadi di masyarakat.⁴ Dalam menjawab keterbatasan paradigma OPA kemudian paradigma *New Public Administration* (NPA) muncul sebagai sebuah usaha yang berorientasi untuk mengorganisasikan, menggambarkan, serta mendesain suatu organisasi melalui sistem desentralisasi agar adanya pemerataan pelayanan bagi masyarakat. Paradigma NPA ternyata masih menimbulkan permasalahan ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat, ketidaksesuaian birokrasi, sistem birokrasi yang kolot, dan terjadinya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan.⁵

Kelemahan dari paradigma NPA selanjutnya disempurnakan oleh paradigma *New Public Management* (NPM). NPM menurut Supriyadi, 2021 menjadi paradigma yang diarahkan untuk mencari atau mendefinisikan kembali peran pemerintah (*Reinventing Government*).⁶ Peran pemerintah tersebut dilakukan dengan mengadopsi cara kerja sektor swasta sehingga fokus pendekatan ini adalah privatisasi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemerintahan. Namun pada perkembangannya, paradigma NPM dianggap tidak sesuai dengan tujuan

⁴ Intan F. Meutia, *Reformasi Administrasi Publik* (Lampung; Anugrah Utama Raharja, 2017), 16

⁵ E.I. Supriyadi, 'Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik'. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No. 1, (2021), 11

⁶ *Ibid.* Hlm 13.

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat (*Public Service*) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*).⁷

Dalam rangka mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat (*Public Service*), muncul paradigma *New Public Service* (NPS) pun hadir sebagai bentuk antitesa dari *New Public Management* yang menolak unsur bisnis dalam pengelolaan sektor publik. Lebih lanjut, pada penerapannya paradigma NPM memperbaiki kekurangan NPM dengan menekankan bahwa “*delivery service to citizen not customer*” yakni konsep pelayanan publik difokuskan untuk masyarakat bukan sebagai pelanggan.⁸ Pernyataan tersebut dipertegas dengan tujuan dari paradigma NPS yang berfokus pada *democracy, pride, dan citizen* daripada *market, competition dan customers* layaknya sektor swasta.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa NPS merupakan paradigma yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan serta pelayanan publik yang berlandaskan untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pada kelanjutannya NPS dianggap memiliki beberapa kelemahan yaitu pendekatan politik dalam administrasi negara, standar ganda dalam mengkritik NPM, karena kritikan NPS terhadap NPM dianggap hanyalah kritikan secara filosofis-ideologis bukan kritikan secara realitas pelaksanaannya. Selain itu, prinsip-prinsip NPS masih diragukan untuk diimplementasikan pada segala kondisi dan situasi. Hal ini mengingatkan bahwasannya tugas pemerintah tak

⁷ Ibid.

⁸ Intan F. Meutia, *Reformasi Administrasi Publik* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 33

⁹ H. Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 42

hanya sebagai penyelenggara pelayanan publik, namun adapun urusan dalam melakukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.¹⁰

Pergeseran paradigma administrasi publik baik OPA, NPA, dan NPS menjadi penjabar bahwa pemerintah mulai bergerak meninggalkan cara-cara tata kelola pemerintahan yang terlalu berpusat pada pemerintah dan organisasinya menjadi semakin terbuka terhadap aktor lain serta jaringan diluar pemerintah. Orientasi tersebut semakin jelas seiring kemunculan paradigma *New Public Governance* (NPG) yang mengakui pentingnya memposisikan pemerintah dalam suatu sistem jaringan dengan aktor lain baik aktor di sektor publik, sektor swasta, dan *non-government*. NPG merupakan bagian pengembangan dari fase governance atau tata kelola pemerintahan yang sudah tidak lagi hanya berpusat pada pemerintah.

Secara sederhana, *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang memiliki unsur-unsur ekonomi, sosial, dan politik yang dikelola melalui adanya interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor privat. Terciptanya *New Public Governance* (NPG) pun berfokus pada hubungan interorganisasional dan atas proses tata kelola, dengan menekankan pada efektivitas layanan dan hasil yang bergantung pada interaksi antar organisasi pelayanan publik dengan lingkungannya.¹¹ Adapun elemen NPG lainnya menurut Koppenjan dan Klijn (2014) terkait dalam pelembagaan hubungan antar aktor, yang dapat dipahami sebagai pola hubungan sosial, seperti interaksi dan hubungan kekuasaan, dan pola

¹⁰ Intan F. Meutia, *Reformasi Administrasi Publik* (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 42

¹¹ I. M. Yudhiantara, 'OPA-NPM (dan E-Gov) - NPG', https://www.researchgate.net/publication/355370971_OPA_-NPM_dan_E-GOV_-_NPG/link/616d6397951b3574c65f73eb/download (23.10.21)

aturan yang mengatur perilaku dalam jaringan, sehingga mengurangi biaya transaksi dan mempengaruhi kinerja jaringan.

Penerapan NPG kemudian mendapat kritik dari Meijer AJ, Lips M and Chen K (2019) yang mengemukakan bahwa NPG dianggap gagal memahami dinamika pemerintahan terbuka karena tidak mengakui sifat kemunculan dari kolaborasi baru yakni bentuk kolaborasi yang mengarah ke berbagai aktor terkoneksi melalui jaringan. Selain itu, NPG tidak menghadirkan pemahaman tentang individualitas masif kerjasama di kota-kota. Mengingat hal tersebut, Meijer dkk (2019) berpendapat bahwa diperlukan pemahaman mengenai tata kelola sebagai *platform* yang memfasilitasi sebuah ekosistem perkotaan.

Platform dijelaskan sebagai sekelompok teknologi yang menjadi dasar aplikasi, proses, atau teknologi lain dikembangkan.¹² Penggunaan platform sebagai teknologi baru merupakan bentuk pentingnya hubungan kolaborasi yang terkoneksi melalui jaringan. Mengingat hal tersebut Meijer dkk dalam penelitiannya “*Open Governance: A New Paradigm for Understanding Urban Governance in an Information Age*” (2019) menyajikan perspektif baru tentang tata kelola perkotaan di era teknologi informasi. Pandangan tersebut tertuang dalam paradigma *Open Governance* (OG) sebagai paradigma baru tata kelola yang memberikan bentuk kolaborasi masif individual di kota yang terfasilitasi oleh *platform* sebagai teknologi baru.

¹² A.A. Sendari, ‘Platform Adalah Dasar Sistem Komputer, Pahami Fungsinya.’ <https://hot.liputan6.com/read/4511749/platform-adalah-dasar-sistem-komputer-pahami-fungsinyah> (21.03.21)

Paradigma *Open Governance* sebagai konfigurasi dari kolaborasi memiliki berbagai elemen atau komponen dalam kerangka yang diperbaharui dari paradigma NPG, yaitu *Radical Openness, Citizen Centricity, Connected intelligence, Digital altruism, dan Crowdsourced deliberation*. Dalam kontribusinya paradigma *Open Governance* akan memberikan pemahaman dan penjelasan terkait bentuk-bentuk kolaborasi baru di perkotaan. Kolaborasi yang dimaksud tidak lagi menganggap bahwa individu menciptakan suatu organisasi dan organisasi tersebut berinteraksi, akan tetapi lebih dari itu dengan teknologi yang memfasilitasi membentuk kolaborasi secara luas seputar informasi dan komunikasi melalui teknologi *platform*.

Tabel 1. 1 Open Governance sebagai Paradigma baru

Paradigma	Akar Teoritis	Sifat Negara	Fokus	Tekanan	Sumber Alokasi Mekanisme	Sistem Layanan	Basis Nilai
Old Public Administration (OPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Ilmu Politik • Kebijakan Publik 	Kesatuan	Sistem Politik	Pengembangan dan Implementasi kebijakan	Hirarki	Tertutup	Etos Sektor Publik
New Public Management (NPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Pilihan rasional/publik • Studi Manajemen 	Regulasi	(Layanan) Organisasi	Sumber Daya dan kinerja organisasi	Pasar	Keterbukaan yang diperhitungkan	Kinerja
New Public Governance (NPG)	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Kelembagaan • Jaringan Organisasi 	Plural	Jaringan Pemerintah	Negosiasi Nilai, makna, dan hubungan	Jaringan	Keterbukaan yang dinegosiasikan	Pengembangan Jaringan
Open Governance (OG)	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Kompleksitas • Jaringan Individualisme 	Terbuka (Open)	Jaringan Individu	Kolaborasi Besar-besaran dan produksi informasi	<i>Platform</i>	Keterbukaan yang Radikal	Kolaborasi tentang nilai bersama

Sumber: Meijer AJ, Lips M and Chen K (2019)

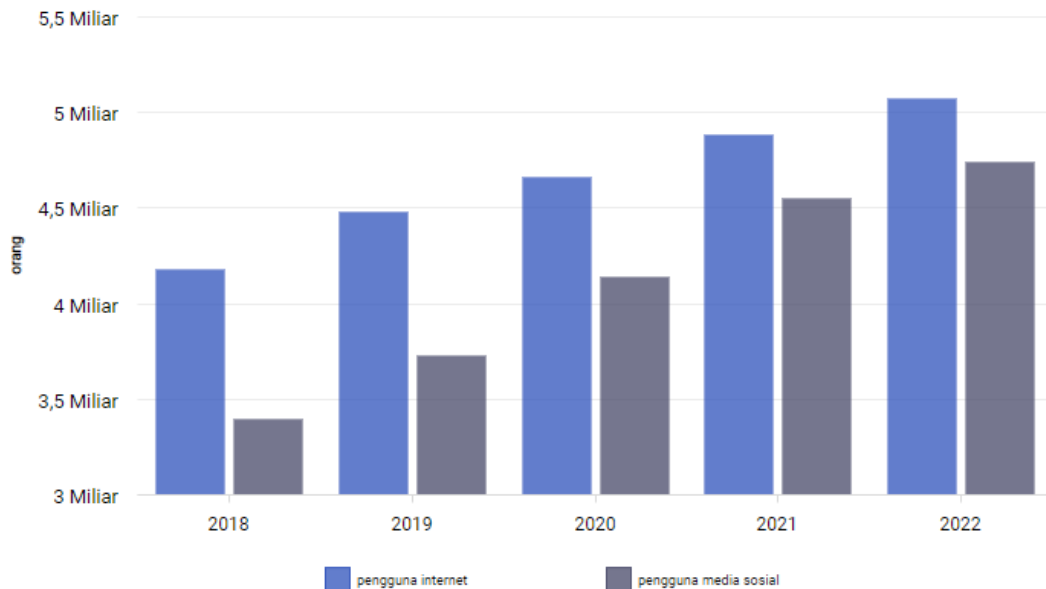
Tabel di atas menjabarkan perkembangan paradigma tata kelola yang mampu menjelaskan bahwa *Open Governance* dapat menjadi paradigma baru yang mendukung perkembangan teknologi dengan membangun kolaborasi masif individual melalui jaringan dari berbagai pihak baik masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pemanfaatan teknologi jaringan dari teknologi *platform*. Kolaborasi dalam *Open Governance* pun dapat menawarkan peluang baru yang inovatif bagi tata kelola kota agar terciptanya nilai bersama di kota.

Penerapan paradigma *Open Governance* yang berfokus pada penggunaan teknologi *platform* selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hal ini terbukti dari perkembangan akses internet dan sosial media yang mereka lakukan untuk memperoleh informasi. Kecenderungan ini terkonfirmasi melalui data laporan *We Are Social* dan *Hootsuite* pada Oktober 2022 yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di seluruh dunia tercatat mencapai 5,07 miliar orang. Jumlah tersebut merupakan 63,45% dari populasi global. Seiring dengan bertambahnya pengguna internet, pengguna media sosial di dunia pun semakin meningkat hingga terdapat 4,74 miliar orang setara dengan 59,32% penduduk dunia.¹³ Banyaknya jumlah pengguna internet dan media sosial menggambarkan bahwa setiap orang melakukan aktivitasnya melalui internet seperti mencari informasi, belanja, bekerja,

¹³ C.M. Annur, 'Jumlah Pengguna Internet Global Tembus 5 Miliar Orang pada Oktober 2022.' <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-5-miliar-orang-pada-oktober-2022#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,totalnya%207%2C99%20miliar%20orang> (23.11.22)

berjualan, atau sekedar bersosial media dengan kerabat dan keluarga. Berikut gambar yang menyajikan grafik jumlah pengguna internet dan media sosial di kancan global.

Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet dan Jumlah Media Sosial Global
(Periode 2018-2022)

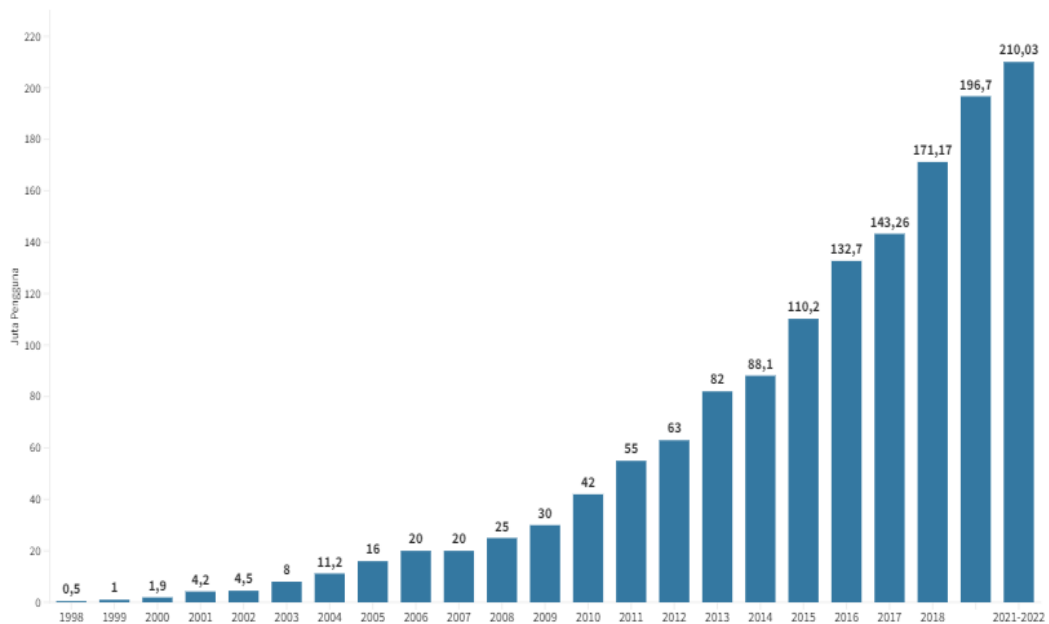


Sumber: Databoks (2022)

Berdasarkan grafik diatas dapat dipahami bahwa pada tahun 2022 jumlah pengguna internet global meningkat 3,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, terdapat pengguna baru media sosial yang telah mencapai 190 juta antara Oktober 2021 hingga Oktober 2022. Mengacu pada data tersebut, dapat dikatakan bahwa internet telah berperan sangat penting dalam kehidupan bagi sebagian besar penduduk dunia.

Selain sangat potensial diterapkan pada tataran global, *Open Governance* menjadi paradigma yang sangat relevan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari besarnya pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2021-2022 angka pengguna internet di Indonesia mencapai 210,03 juta pengguna.¹⁴ Dibawah ini gambar grafik pengguna internet di Indonesia dari setiap tahunnya.

Gambar 1. 2 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (1998-2022)



Sumber: APJII

Berdasarkan gambar di atas dapat dipahami bahwa pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah dengan mengalami pertumbuhan

¹⁴ D. Bayu, 'APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022.' <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022> (10.06.22)

yang cukup signifikan. Mengacu pada data terkait pengguna internet dan media sosial yang terus mengalami kenaikan menjadi fakta atas urgensi perubahan pola aktivitas masyarakat, maka pentingnya pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan pelayanan melalui teknologi *platform*.

Selain karena angka pengguna teknologi informasi yang tinggi, paradigma *Open Governance* juga sangat tepat diterapkan di Indonesia karena dapat mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* yang tengah menjadi perhatian pemerintah. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam memberikan layanan kepada para pengguna yaitu instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan lainnya. Hal tersebut telah tercantum pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lebih lanjut, SPBE mampu memberikan peluang untuk mendorong serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasi, inovatif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama yakni meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas.¹⁵ Tujuan SPBE selaras dengan paradigma *Open Governance* yang menganggap bahwa teknologi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi pemerintah saja akan tetapi mengurangi biaya transaksi kolaborasi. SPBE juga dapat memfasilitasi bentuk baru keterlibatan antar aktor dengan skala besar.

¹⁵ PANRB, 'Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).'
<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-2>
(22.05.20)

Selain mendukung SPBE, paradigma *Open Governance* juga mendorong penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶ Saat ini bentuk otonomi tersebut diselenggarakan dengan salah satu inovasi dalam menciptakan pembangunan daerah yaitu *Smart City*. Kota pintar atau *smart city* adalah segala upaya inovasi yang diselenggarakan ekosistem kota guna menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan tingkat kualitas setiap individu maupun komunitas setempat.¹⁷ Penyelenggaraan *smart city* perlu didukung oleh paradigma baru yang lebih mampu menjelaskan bentuk-bentuk pemerintahan yang inovatif di perkotaan. Inovasi tersebut sesuai dengan hadirnya paradigma *Open Governance*.

Open Governance memiliki relevansi dengan penyelenggaraan *smart city* atau kota cerdas. Menurut Menteri Kominfo RI, *smart city* tidak hanya berbincang tentang teknologi tetapi ditujukan sebagai usaha inovatif dalam merubah atau memperbaiki ekosistem kota, teknologi disini merupakan fasilitas yang memudahkan segala sesuatunya untuk digunakan.¹⁸ Orientasi pada pemanfaatan teknologi untuk kolaborasi pembangunan dalam mewujudkan *smart city* sangat sesuai dengan paradigma *Open Governance* yang dibentuk sebagai upaya untuk

¹⁶ UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 6

¹⁷ L. Rizkinaswar, 'Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City dalam Pembangunan Kota.' <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/> (10.10.20)

¹⁸ Ibid.

mengembangkan usaha mengatur kembali kolaborasi antara berbagai aktor. Kolaborasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya inovatif dalam mengubah ekosistem kota yang difasilitasi oleh teknologi yang dapat mengurangi biaya transaksi layanan.¹⁹ Melalui upaya ini akan tercipta pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sebagai salah satu pelopor *smart city*, Kota Bandung telah mengimplementasikan konsep Bandung *Smart city* pada sistem tata kelola kotanya. Dalam pelaksanaan *smart city* Pemerintah kota Bandung sendiri telah menorehkan prestasi sebagai *Top 50 Smart City Government rankings* yang diluncurkan oleh *Eden Strategy Institute*.²⁰ Tak hanya itu, bahkan kota Bandung juga meraih indeks smart city tertinggi di Indonesia dengan angka 3,71 dan menjadi kota terbaik dari 100 *Smart City* di Indonesia.²¹ Semua prestasi yang diperoleh oleh kota Bandung didapatkan berbagai inovasi di bidang aplikasi dan layanan berbasis digital yang telah dilakukan oleh Pemkot Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung serta warga kota Bandung.

Sebagai perwujudan Bandung *Smart City*, Pemerintah Kota Bandung melahirkan sebuah inovasi terbaru yang telah dirilis pada bulan Desember 2021

¹⁹ A. J. Meijer, M. Lips, K. Chen, 'Open Governance: A New Paradigm for Understanding Urban Governance in an Information Age Front Sustain'. *Frontiers in Sustainable Cities* Vol, 1. No, 3 (2019), 1

²⁰ W. Putra, 'Bandung Peringkat 28 Smart City Dunia, Ungguli Dubai-Los Angeles.' <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5516579/bandung-peringkat-28-smart-city-dunia-ungguli-dubai-los-angeles> (01.04.21)

²¹ Humas Kota Bandung, 'Akselerasi Berbagai Program, Sepanjang Tahun 2022 Kota Bandung Banjir Penghargaan.' <https://www.bandung.go.id/news/read/7369/akselerasi-berbagai-program-sepanjang-tahun-2022-kota-bandung-banjir#:~:text=Kota%20Bandung%20berhasil%20meraih%20indeks,100%20Smart%20City%20di%20Indonesia> (12.12.20)

yakni SADAYANA atau disebut juga semua digital layanan kota.²² Secara singkat, SADAYANA merupakan sistem layanan digital yang memiliki peran sebagai wadah literasi digital dan tempat berkolaborasi masyarakat Bandung. SADAYANA bertujuan untuk mempermudah setiap masyarakat Kota Bandung dalam menikmati dan mendapatkan semua layanan dalam satu media *platform* yang disertai dengan bermacam-macam fitur menarik di dalamnya.

Namun pada pelaksanaannya, SADAYANA belum dapat berjalan sesuai dengan peran dan tujuannya, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang ditemukan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, antara lain:²³

1. Tingkat penggunaan SADAYANA belum mencapai target yang ditetapkan oleh Diskominfo Bandung. Target tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu target jangka pendek sebanyak 10.000 pengguna untuk tahun pertama dan target jangka panjang untuk tiap tahun bertambah 10.000 per tahunnya. Namun sayangnya pada tahun pertama setelah peluncuran SADAYANA, target tersebut tidak dapat tercapai karena pengguna saat ini hanya sebanyak 8.800 pengguna atau 88% dari target 10.000 pengguna.
2. Belum meratanya database pengguna SADAYANA, karena masih sebatas internal pegawai pemerintah Kota Bandung dan beberapa

²² M. N. Prilatama, 'Sadayana, Rumah layanan Digital Milik Kota Bandung.' <https://jabar.tribunnews.com/2022/12/09/sadayana-rumah-layanan-digital-kece-milik-kota-bandung> (09.12.22)

²³ Berdasarkan Wawancara secara daring dengan Bapak Ganjar Setya Pribadi, 29 Desember 2022 pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

masyarakat yang sebelumnya mengikuti event atau lomba di SADAYANA saja.

3. Fitur-fitur yang diakses warga pada SADAYANA masih terbatas pada fitur tertentu, dari berbagai fitur yang ada pada SADAYANA warga hanya mengakses beberapa fitur saja seperti CCTV publik dan *Citizen Journalism (Threads)*.

Melihat berbagai kendala tersebut, peneliti pun melakukan peninjauan lebih lanjut kepada beberapa pengguna layanan SADAYANA terkait pendapat, dan pengalaman mereka pada saat menggunakan SADAYANA, yaitu sebagai berikut.²⁴

1. Tidak seluruh fitur dapat diakses dan digunakan dalam layanan SADAYANA, sebab beberapa fitur sering terjadi kesalahan *server* pada saat akan digunakan.
2. Masih terbatasnya informasi yang tersedia pada sistem layanan digital SADAYANA.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan SADAYANA karena masyarakat Kota Bandung sendiri masih banyak yang tidak mengetahui SADAYANA.

Berdasarkan hasil kedua data terkait indikasi masalah sistem layanan digital SADAYANA. Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa indikasi masalah *Open Governance* pada sistem layanan digital SADAYANA, antara lain:

1. Kegagalan prinsip *connected intelligence* pada sistem layanan digital SADAYANA. Prinsip ini menerapkan akses layanan digital yang cepat

²⁴ Berdasarkan wawancara secara daring dengan beberapa pengguna SADAYANA dengan inisial MAH, CK, dan SGK, pada 10 Januari 2023

(*instant access*). Sayangnya, SADAYANA belum dapat menerapkan akses cepat pada layanan karena fitur-fitur pada SADAYANA yang dapat diakses masih terbatas, dan pada beberapa fitur sering terjadi kesalahan *server* atau *error*.

2. Kegagalan prinsip *digital altruism* pada sistem layanan digital SADAYANA. Prinsip ini berfokus pada kolaborasi antar masyarakat luas untuk bersama-sama menyajikan berbagai informasi publik. Sayangnya, SADAYANA belum dapat menciptakan kolaborasi tersebut karena belum meratanya database pengguna SADAYANA, hal ini menyebabkan masih terbatasnya informasi yang disediakan pada dalam SADAYANA.
3. Kegagalan prinsip *radical openness* pada sistem layanan digital SADAYANA. Prinsip ini berfokus pada layanan digital yang komunikatif dan terbuka yang dapat menjangkau seluruh masyarakat. Sayangnya, SADAYANA masih belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital SADAYANA, hal ini karena minim jumlah pengguna SADAYANA, database pengguna SADAYANA masih terbatas, dan kurangnya sosialisasi terkait layanan digital SADAYANA.

Berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang telah peneliti temukan, maka peneliti melakukan penelitian mengenai analisis *Open Governance* dalam sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Open Governance* sebagai paradigma baru dalam sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti memutuskan untuk rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Open Governance dalam sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung?*”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk *mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Open Governance dalam sistem layanan digital SADAYANA Kota Bandung.*

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini mengenai “Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung” ini terdapat beberapa manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2 bagian, antara lain sebagai berikut.

1. MANFAAT TEORITIS

Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang ilmu administrasi publik khususnya pemahaman mengenai penerapan paradigma administrasi publik *Open Governance*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membantu penelitian selanjutnya terutama penelitian yang

berkaitan dengan penerapan *open governance* dalam sistem layanan publik berbasis digital.

2. MANFAAT PRAKTIS

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung dalam menyelenggarakan dan melaksanakan sistem layanan publik berbasis digital yang berwawasan *Open Governance*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kota/kabupaten lainnya dalam menginisiasi sistem layanan publik berbasis digital yang berwawasan *Open Governance*.

1.5 SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyediakan sistematika pemikiran dengan membagi ke dalam beberapa bagian menjadi susunan bab. Hal ini diharapkan dapat mempermudah penulis dalam melakukan penulisan dan penyusunan penelitian serta bermanfaat bagi para pembaca untuk lebih mudah memahami isi penelitian “Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung”. Dibawah ini susunan bab dalam penelitian ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pertama, penelitian ini berisikan gambaran secara umum arah penelitian sehingga ditemukan dan diketahuinya latar

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan “Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung”, serta sistematika penelitian yang telah disusun oleh peneliti agar pembaca dapat memahami alur penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kedua, penelitian ini menjelaskan kajian pustaka yang meliputi teori yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan diawali dengan penelitian terdahulu, selanjutnya terdapat berbagai teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai kerangka teoritik yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Paradigma *Open Governance*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ketiga, penelitian ini menjelaskan metode serta langkah-langkah penelitian yang digunakan di mulai dari rancangan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, penentuan informasi, instrumen penelitian, skala pengukuran, uji validitas, uji reliabilitas, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PROFIL PENELITIAN

Pada bagian keempat, penelitian ini menyajikan informasi terkait objek penelitian yaitu aplikasi SADAYANA (Semua Digital Layanan Kota) milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang terdiri dari profil SADAYANA.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian kelima, penelitian ini menjabarkan temuan atau hasil penelitian yang didapatkan melalui proses survei kepada pengguna aktif fitur threads SADAYANA. Selanjutnya, adapun bagian pembahasan yang menggambarkan gagasan peneliti terkait menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan analisis data *central tendency* yang meliputi mean, median, dan modus hasil temuan dalam kuesioner penelitian melalui program SPSS.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian terakhir, penelitian ini menyajikan kesimpulan atau ringkasan yang memuat makna pokok sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait “Analisis *Open Governance* pada Sistem Layanan Digital SADAYANA Kota Bandung”. Lebih lanjut, terdapat pula saran atau masukan yang memuat rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan oleh peneliti atas hasil dan temuan penelitian, supaya manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis dapat tercapai sesuai point-point yang telah dijabarkan peneliti pada Bab 1.